

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemakmuran dan kemajuan ekonomi bergantung pada besarnya pertumbuhan yang tercermin dalam perubahan *output* nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.¹ Secara keseluruhan, dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan peluang dan kesetaraan ekonomi yang lebih besar. Pertumbuhan perekonomian dunia selama dua abad terakhir telah membawa dua dampak yang sangat penting, yaitu peningkatan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat internasional dan penyediaan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus bertambah.²

Salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sektor keuangan. Menurut Patrick terdapat dua kemungkinan hubungan kausalitas antara pembangunan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama, *demand-following*, bahwa rendahnya pertumbuhan sektor keuangan adalah manifestasi kurangnya permintaan akan jasa

¹ Ahmad Ma'ruf dan Lastri Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 9, no. 1 (2008): 44–55.

² Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 117–122.

finansial. Kedua, *supply-leading*, bahwa sektor mendahului dan mendorong pertumbuhan sektor riil. *Demand-following* adalah fenomena ketika pembentukan institusi finansial modern, aset dan liabilitas, dan berbagai jasa keuangan adalah sebagai respon dari meningkatnya permintaan jasa keuangan oleh para investor dan penabung dalam sektor riil. Pada saat perekonomian riil tumbuh maka permintaan akan jasa keuangan juga akan bertambah, dengan semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan juga akan menjadi positif. *Supply-leading* berarti bahwa pembangunan institusi dan pasar keuangan akan meningkatkan penawaran jasa keuangan terutama permintaan jasa oleh para pengusaha dan investor yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi riil.³

Masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial masih menjadi isu utama di Indonesia hingga saat ini. Permasalahan ekonomi itu mencakup: Pertama, perbaikan kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi, Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran harus diatasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan impor, tingkat impor Indonesia masih tinggi karena output disektor pertanian dan peternakan kian rendah, sementara pertumbuhan penduduk terus menerus meningkat. Proses impor mencakup

³ Patrick, "Financial Development And Economic Growth In Underdeveloped Countries", *Economic Development and Cultural Change*, 2 (1996), 174-189.

kegiatan memasukan barang dari negara lain ke dalam negeri. Pada satu sisi, nilai *impor* indonesia masih tergolong tinggi. Sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ketiga, Daya beli stagnan, umumnya dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Inflasi turut memengaruhi daya beli masyarakat. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif tetap, sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Keempat, Rendahnya daya saing, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung, terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini memengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Kelima, Ketidaksiapan dalam menghadapi revolusi industri, dalam menghadapi revolusi industri, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dalam industri, yakni *internet of things*, dan mitigasi tenaga kerja, juga memengaruhi masalah ekonomi di indonesia. Keenam, Inkonsistensi kebijakan subsidi energi, terjadi penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun yang kemudian memengaruhi masalah ekonomi di indonesia. Padahal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan pihak yang berhak menerima subsidi. Ketujuh, Rendahnya kinerja pajak, pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Disisi lain, rasio utang terhadap PDB (Produk

Domestik Bruto) mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedelapan, Permasalahan dana desa, alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial dipedesaan. Ada 10 provinsi dengan tingkat ketimpangan pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan level nasional, yaitu Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.⁴

Dalam pertumbuhan ekonomi juga terdapat peranan yang sangat penting dari bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Hal ini terlihat dari naik turunnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional dan global selama beberapa tahun terakhir. Fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yaitu, manajer investasi, investor, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, serta pelaksanaan kegiatan sosial. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan

⁴ Vanya Karunia Mulia Putri, “8 Masalah Ekonomi Di Indonesia”, *Kompas.com*, 03 November 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/100000369/8-masalah-ekonomi-di-indonesia?page=all>.

prinsip-prinsip syariah.⁵ Perbankan syariah telah ada selama ini dan dipandang sebagai tren yang progresif. Dalam bank syariah, Konsep keuangan Islam didasarkan pada dimensi tauhid dalam kegiatan bisnis dan komersial, sehingga pedoman dasar dan rujukannya adalah *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*. Demikian pula bank syariah, sebagai lembaga keuangan syariah, bertanggung jawab atas implementasi komersial, dalam hal ini menyediakan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan alokasi dana syariah adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bank syariah mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Semua uang ini kembali dalam bentuk pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada masyarakat maka akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau nota dalam bentuk transaksi bagi hasil, transaksi sewa guna angsuran, transaksi pembelian dan penjualan, transaksi peminjaman, transaksi sewa jasa dan transaksi jasa lainnya. Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pembiayaan atau pihak pemberi fasilitas pembiayaan untuk mengembalikan dananya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan

⁵ Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 4*", Yogyakarta, Ekonisia Kampus Universitas Islam Indonesia, 2013, Hal 29-45.

⁶ Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya, and Mahfudz Reza Fahlevi, "Pengaruh Pembiayaan Syariah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1409–1415, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2602>.

ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁷ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020, jumlah pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah dan unit usaha syariah mencapai Rp 383,944 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan perolehan pada tahun 2019 sebesar Rp 355.182 miliar. Melihat pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Hal ini memberikan banyak harapan, salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan permasalahan perekonomian itu sendiri. Bank syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mengentaskan permasalahan perekonomian.⁸ Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Bank syariah dapat dinamakan *universal bank* karena melakukan kegiatan *investmentbank* dan *commercial bank*. Sebagai contoh, bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Kegiatan usaha seperti itu tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional.⁹

Pembiayaan bank syariah dari perbankan memiliki potensi untuk bertumbuh pada tahun depan ditengah kondisi ekonomi global yang tak menentu. Sejumlah bank syariah mencatat peningkatan kredit setidaknya per

⁷A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2012, Hal 79.

⁸ www.ojk.go.id.

⁹ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2012, Hal 43.

September 2022. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang menantang bagi semua sektor karena ada ancaman resesi global. Meski begitu, Indonesia diuntungkan oleh tingginya harga barang-barang komoditas sehingga membantu membantu pulihnya ekonomi seiring meredanya pandemi covid-19. Dengan kondisi tersebut permintaan terhadap pembiayaan syariah akan tumbuh dan membaik. Seharusnya bank-bank syariah mampu memacu pertumbuhan kreditnya lebih tinggi, salah satunya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah. Bank-bank syariah di Indonesia memang mencatat pertumbuhan kredit setidaknya per September 2022. BSI misalnya mencatat pertumbuhan kredit 22,35% secara tahunan menjadi Rp.199,82 Triliun. Pertumbuhan pembiayaan ini diiringi dengan perbaikan pada sisi kualitas pinjaman. Begitu juga dengan pembiayaan di PT Bank BTPN Syariah Tbk yang tumbuh 11,1% yoy menjadi Rp.11,3 triliun. Lalu, pembiayaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah mencatat pertumbuhan 2% yoy menjadi Rp.9,7 triliun. Hanya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mencatat penurunan pembiayaan 32% yoy menjadi Rp.10,31 triliun. Bank muamalat juga optimis pembiayaan mereka akan tumbuh pesat pada tahun depan ditengah gejolak ekonomi global.¹⁰

¹⁰ Fahmi Ahmad Burhan, "Pembiayaan Bank Syariah Puya Potensi Moncer Tahun Depan, Siapa Terbesar?" *Bisnis.com*, 13 Desember 2022, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221213/90/1607854/pembiayaan-bank-syariah-punya-potensi-moncer-tahun-depan-siapa-terbesar>.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia menjelaskan bahwa kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Upaya meningkatkan pembangunan manusia, pemerintah harus memfasilitasi infrastruktur pendidikan, kesehatan dan bidang ekonomi, sehingga dapat meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memacu pertumbuhan ekonominya dengan memprioritaskan pelayanan prima dalam pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi.¹¹ Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan membuat masyarakat lebih produktif dalam bekerja. Semakin tinggi produktivitas maka semakin tinggi pula pendapatannya. Jika pendapatan tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan menurun karena sumber daya alam merupakan sumber utama kebutuhan manusia. Jika masyarakat tidak mempunyai keterampilan, maka mereka tidak mempunyai pendapatan, sehingga menyebabkan berkurangnya daya beli dan kemiskinan. Hal ini akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau bahkan negara.¹²

¹¹ Awal Nopriyanto Bahasoan, Riady Ibnu Khaldun, Aswar Rahmat, dan Taufik Hidayat B Tahawa, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Tengah", *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah* 1(2) (2019): 74-83.

¹² Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217.

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Perkembangan (%)
2010	71,17	-0,82
2011	67,09	-5,73
2012	67,70	0,91
2013	68,31	0,90
2014	68,90	0,89
2015	69,55	0,94
2016	70,18	0,91
2017	70,81	0,90

Sumber: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa IPM di Indonesia pada 2017 mencapai 70,81 poin atau naik sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala BPS Suhariyanto bahwa IPM Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan. Saat ini, dengan IPM berada pada angka 70,81 poin masuk dalam kategori tinggi. Namun, masih ada ketimpangan yang cukup tinggi khususnya antara DKI Jakarta dengan Papua. IPM Indonesia ada kenaikan, tapi ada pekerjaan rumah terkait dengan ketimpangan, baik antar provinsi, dan antar kabupaten kota. IPM provinsi DKI Jakarta tercatat mencapai 80,06 poin atau masuk kategori sangat tinggi. Sementara di Papua, IPM tercatat sebesar 59,09 atau masih masuk kategori rendah. Rata-rata IPM Indonesia sejak 2010 s/d 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,89 persen. IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang

diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dengan melihat umur harapan hidup tahun 2017, bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 71 tahun, anak-anak yang berusia 7 tahun, memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 12 tahun. Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan indeks pembangunan manusia adalah indeks pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan lambatnya pertumbuhan ekonomi.¹³

Berdasarkan uraian diatas pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, sedangkan indeks pembangunan manusia yaitu beberapa ukuran dasar pencapaian pembangunan manusia. Pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena keduanya berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini dikuatkan oleh penelitian berjudul “Analisis Dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di

¹³ BPS, “Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I.Yogyakarta Tahun 2017,” *Indonesian Statistical Board* 19, no. 27 (2020): 1–8, <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>.

Indonesia” yang dilakukan oleh Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati yang menyatakan bahwa dampak IPM terhadap kemiskinan di Indonesia ada dampak negatifnya secara langsung, sementara pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai dampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dengan menganalisis pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi karena instrumen keuangan syariah maupun sektor *riil* memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian di suatu negara. Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pandemi Virus Corona.
2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 tumbuh menjadi 5,02% dan menurun menjadi 2,07% pada tahun 2020.
3. Pada tahun 2020 pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia meningkat, namun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Seharusnya meningkatnya pembiayaan bank syariah dan indeks

pembangunan manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih tepat sasaran dan tidak melampaui ruang lingkup pembahasan yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian saja. Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat bahwa batasan pertanyaan penelitian ini hanya akan fokus pada dampak pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 hingga 2022. Untuk pembiayaan bank syariah hanya dibatasi pada jenis akad, yaitu bagi hasil, piutang, pembiayaan sewa (pembiayaan sindikasi, pembiayaan secara penyaluran, pembiayaan secara pelaksanaan, dan pembiayaan sewa lainnya) periode 2005-2022.

D. Rumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2005-2022?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2022?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2005-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang pembiayaan bank syariah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Bagi Peneliti

Kajian ini dapat memperluas wawasan peneliti terhadap isu-isu relevan secara lebih mendalam dan menjadi wadah penerapan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Selain itu diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada di perbankan syariah sehingga memperluas dan memperkaya

pengetahuan khususnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi industri perbankan syariah Indonesia dalam meningkatkan kinerja dalam hal inklusi keuangan dan memaksimalkan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Kajian Pustaka dan Studi Relevan yang terdiri dari Kajian Pustaka, Studi Relevan, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.
3. Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel dan Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian.
4. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum dan Objek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.
5. Bab V Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.